

dinamika terbentuknya kekuasaan akan selalu mengiringi terbentuknya kelompok sosial utamanya kelompok sosial formal yang menuntut adanya sebuah keteraturan dan struktur hirarkis. kelompok sosial adalah sebutan lain dari sebuah komunitas atau secara formal disebut organisasi, lembaga atau institusi, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan kelompok sosial ini menjadi seperti dua keping mata uang yang saling melengkapi.

Bertrand Russel (1998) mengungkapkan bahwa negara sebagai sebuah bentuk kelompok sosial atau organisasi terbesar mengarahkan pola dan bentuk kekuasaannya dalam sebuah struktur yang selanjutnya dikenal dengan pemerintahan sebagai sebuah lembaga yang bertugas untuk mengatur dan memastikan bahwa negara dalam menjalankan setiap prosesnya berada di jalur yang sesuai. Pemerintah selanjutnya menciptakan lembaga-lembaga atau instansi untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Lahirlah lembaga-lembaga pemerintahan yang secara langsung juga menciptakan bentuk pembagian kekuasaan yang disebar dengan pola-pola tertentu untuk dijalankan oleh setiap orang yang dianggap berkualitas dan berkapabilitas. Orang-orang yang mengisi ruang-ruang kekuasaan inilah yang dikenal oleh masyarakat awam dengan sebutan pejabat.

Pola pengisian kekuasaan dalam lingkup kenegaraan inilah yang kemudian menjadi salah satu problema baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam era demokratisasi dimana rakyat diberikan kesempatan untuk turut andil dalam memberikan suara dan menentukan siapa orang-orang yang akan mengisi ruang-ruang kekuasaan. Kecenderungan kelompok sosial yang terikat dalam identitas-identitas tertentu untuk menampakkan eksistensi dan superioritasnya dalam ranah kekuasaan menjadi sebuah fenomena yang selalu mencuat dalam ranah sosial politik yang hampir berlaku secara universal termasuk di Indonesia utamanya pada era demokratisasi terbuka seperti saat ini.

Pariela (2012) mengungkapkan reformasi politik tahun 1998 menyebabkan berbagai saluran aspirasi politik menjadi terbuka, tetapi hal itu tidak disertai dengan kematangan kelompok-kelompok masyarakat untuk hidup berbeda. Ini kenyataan yang dapat dipahami, mengingat masyarakat berada dalam situasi hegemoni negara yang begitu kuat dan lama. Atas nama semangat demokrasi dan otonomi daerah, politik identitas tampak kembali memperoleh momentumnya untuk bangkit, tetapi tidak di tengah situasi di mana *bridging social capital*¹ berada pada tingkat yang solid dan kuat. Sebaliknya, politik identitas semakin mengental justru di tengah rendahnya derajat *bridging social capital* (atau menguatnya *bonding social capital*²) atau berkembang di tengah kemacetan dialog antar peradaban baik pada tingkat nasional maupun lokal, suatu kondisi sosial-politik yang relatif mirip dengan di masa Orde Lama.

¹ Modal sosial yang merujuk pada relasi-relasi antar kelompok yang heterogen, dan memperkuat ikatan-ikatan sosial lintas kelompok-kelompok tersebut

² Modal sosial yang mengacu pada relasi di antara kelompok-kelompok yang relatif homogen dan memperkuat ikatan-ikatan sosial di dalam kelompok yang bersangkutan

kebebasan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini terkurung dan terkesan dikebiri oleh pemerintah. Demokrasi dalam sistem pemerintahan selalu didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, akan tetapi hal ini dengan tegas dianggap perlu didefinisikan kembali, Max Weber lebih sepakat jika demokrasi pada dasarnya adalah sebuah bentuk baru dari persaingan untuk mendapatkan kepemimpinan politik, dan sebagai sebuah bentuk persaingan maka berbagai cara dan upaya akan digunakan oleh mereka yang menginginkan kepemimpinan dan kekuasaan tersebut (Outhwaite:2008:260).

Muhtar Haboddin (2012) memaparkan bahwa menguatnya politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca pemberlakuan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing. Di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Papua yang secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain. Reformasi secara langsung telah membuka ruang bagi keberagaman etnis dan budaya untuk menonjolkan eksistensinya dengan berbagai cara. Jika pada masa orde baru pertentangan demi menunjukkan eksistensi etnis kerap diwarnai dengan konflik-konflik yang mengarah pada kekerasan dan anarkisme maka pada era otonomi daerah dengan prosesi pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung,

maka konflik tersebut berubah menjadi sedikit eksklusif yakni perebutan kekuasaan demi mengangkat eksistensi etnis.

Kasus-kasus di atas adalah sebagian kecil dari bagaimana politik identitas dalam hal ini etnisitas mencuat dalam dinamika politik dan kekuasaan di Indonesia. Pemilihan kepala daerah yang diisukan sarat dengan permainan politik etnisitas secara langsung memanaskan etnosentrisme dikalangan masyarakat bawah. Hal ini utamanya terjadi di daerah-daerah yang secara kultural terdiri dari lebih dari satu etnis, yang secara historis sering etnis-etnis tersebut sering terlibat konflik seperti kasus-kasus kekerasan.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia melalui otonomi daerah mencuatkan sebuah fenomena baru yakni kepemimpinan “putra daerah” dalam hal ini pengisian jabatan-jabatan politis dan administratif oleh orang-orang asli di daerah. Hanya saja putra daerah memunculkan sebuah persaingan baru khususnya untuk daerah-daerah yang secara etnis dan kebudayaan adalah daerah yang heterogen atau terdiri dari lebih dari satu etnis. Karena setiap etnis merasa bahwa orang dari golongannya yang paling berhak untuk menyematkan label “putra daerah”.

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah multietnis dalam dinamika kekuasaannya juga tidak terlepas dari wacana politik etnis. Dalam pemilihan gubernur sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan proses pemilihan kepala daerah secara langsung maka isu tentang pemimpin dari “orang daratan” dan “orang kepulauan” selalu mencuat. Orang

seseorang dari kalangan etnis Tolaki sedangkan orang kepulauan digunakan untuk orang-orang dari etnis Muna dan Buton (Tirtosudarmo:2004:67)

Berdasarkan sejarah pemerintahan Sulawesi Tenggara seperti yang diungkapkan Jabar (2007:52-53) bahwa sejak pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964 hingga tahun 2008 hanya sekali saja etnis Tolaki sebagai “orang daratan” menjabat sebagai gubernur yakni pada tahun 1978-1982 yang dijabat oleh Drs. Abdullah Silondae dan sisanya selalu didominasi oleh “orang kepulauan”. Dominasi inilah yang disinyalir menciptakan sebuah bentuk solidaritas untuk perlawanan yang dilakukan oleh etnis Tolaki sehingga saat ini gubernur dijabat oleh Nur Alam sebagai representasi dari suku Tolaki atau orang daratan mampu memenangkan pilgub dan akhirnya menjabat untuk dua periode kepemimpinan yakni 2008-2013 dan 2013-2018.

Dinamika pemilihan gubernur yang terjadi di Sulawesi Tenggara sangat erat kaitannya dengan politik etnis baik itu dalam kecenderungan pemilih, dan juga dalam jejaring politik yang digerakkan dalam suksesi pemilihan. Dalam pemilihan gubernur tahun 2007 misalnya, tekad dari “orang daratan” untuk menggantikan dominasi kekuasaan oleh “orang kepulauan” di Sulawesi Tenggara sangat kuat mengingat dalam sejarah kepemimpinan untuk jabatan gubernur Sulawesi Tenggara selalu didominasi oleh “orang Kepulauan”. Sebaliknya momentum pemilihan gubernur 2007 akan dimanfaatkan oleh “orang kepulauan”

untuk menunjukkan dominasinya dalam peta kekuasaan di Sulawesi Tenggara. (Jabar, 2007:54).

Untuk menyukseskan kemenangan masing-masing calon yang merepresentasikan keterwakilan dari dua etnis besar yang bersaing ini digunakanlah kekuatan-kekuatan identitas dalam hal ini etnis. Jabar (2007) dalam penelitiannya menguraikan bagaimana perilaku politik etnis Tolaki dalam pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2007 guna memenangkan Nur Alam sebagai calon gubernur yang mewakili etnis Tolaki dengan mengoptimalkan beragam aspek strategis yang ada dalam pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2007. Hal ini kemudian yang menguatkan posisi Nur Alam untuk mampu memenangkan pertarungan politik dalam pemilihan gubernur tersebut. Kecenderungan pemanfaatan jejaring etnis juga masih terus dipertahankan dan dioptimalkan dalam pemilihan gubernur tahun 2013 yang sekali lagi memenangkan Nur Alam.

Menguatnya politik identitas dalam ranah sosial politik khususnya dalam pemerintahan telah menciptakan sebuah bentuk baru dari solidaritas atas nama etnisitas, melemahnya nilai-nilai pluralitas dan multikulturalisme, penciptaan lingkungan sosial dalam nuansa persaingan bahwa etnis tertentu lebih superior dan yang lain inferior, mendramatisasi sejarah dan menyimpulkannya dalam bahasa dominasi-dominasi antar golongan, pemetaan batas-batas teritorial secara negatif yang cenderung memisahkan dalam bahasa “daratan” dan “kepulauan”. Jika pemahaman-pemahaman tersebut kemudian meresap kedalam kehidupan bermasyarakat dan sosial maka tidak dapat dipungkiri hal tersebut akan

menimbulkan konflik yang tentunya akan menghambat jalannya aspek-aspek kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil kajian Lingkar Survei Indonesia (2008), persaingan untuk mengisi jabatan dengan menggunakan pendekatan identitas dalam hal ini etnis tidak hanya terjadi dalam level pilkada, akan tetapi juga sudah merambah kedalam birokrasi dalam instansi pemerintahan. Dikalangan birokrasi dan jajaran eksekutif, politik etnisitas dan politik identitas juga nampak terus mewarnai wajah birokrasi nasional dan lokal. Politik etnisitas dan politik identitas dalam hal ini terus berkembang baik secara laten dan manifest dan seringkali sangat menentukan dalam berbagai arena pengambil kebijakan hingga implementasi kebijakan.

Lingkungan politik yang terbentuk dengan sistem politik terbuka seperti saat ini dengan menjadikan identitas-identitas etnis sebagai modal sosial dalam perburuan kekuasaan utamanya kekuasaan di level pemerintahan atau disebut sebagai politik identitas mempunyai kecenderungan mempengaruhi pola pemilih dalam menentukan pemimpin di arena lain selain pemerintahan seperti di perguruan tinggi sebagai sebuah institusi pendidikan. Rektor dan Dekan di perguruan tinggi merupakan jabatan kekuasaan dalam lingkup perguruan tinggi yang tentunya dalam proses pemilihan dan penunjukannya melalui dinamika tersendiri.

Fenomena dan kecenderungan mengenai etnisitas politik yang terjadi pada pengisian jabatan-jabatan di Sulawesi Tenggara diungkapkan dalam penelitian

bahwa kekuasaan oleh kelompok etnis tertentu dalam konteks kepemimpinan partai politik para pemimpinnya sangat kental dipengaruhi oleh faktor etnisitas. Partai Golkar dikuasai oleh orang Buton dan Muna, PDIP oleh orang Muna, PAN untuk etnis Tolaki, dan PDK untuk orang Bugis. Sementara dalam lingkup Unhalu dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa. Misalnya orang Bugis menguasai Fakultas Ekonomi, orang Buton dan Muna menguasai Fakultas Pertanian dan Pendidikan, sedangkan untuk FISIP dikuasai oleh suku Bugis, Makassar dan Tolaki.

Hal yang sama juga terjadi dalam kekuasaan tertinggi di Universitas yang selama empat periode dikuasai oleh etnis Muna. Pasca reformasi kontestasi pemilihan rektor yang berlangsung pada tahun 2000 menetapkan Mahmud Hamundu sebagai rektor Unhalu untuk periode 2000-2004 dan terpilih kembali untuk kedua kalinya yakni masa-jabatan 2004-2008, selanjutnya ditetapkan Usman Rianse pada periode 2008-2012 dan juga terpilih kembali untuk periode 2012-2016, kedua rektor tersebut berasal dari etnis Muna.

Keberadaan universitas sebagai institusi sosial yang dijalankan oleh pemerintah dan swasta dalam aspek pendidikan tidak menutup kemungkinan pola kekuasaan dan pengisian jabatan di dalam struktur kelembagaannya juga dipengaruhi oleh politik identitas dalam hal ini etnosentrisme. Institusi pendidikan yang ada di masing-masing daerah atau wilayah merupakan sebuah miniatur dan potret tentang bagaimana pembauran ragam etnis dan keberagaman budaya dari sebuah daerah atau wilayah.

Institusi pendidikan adalah sebuah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang mempunyai intelektualitas dan rasionalitas yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam, para civitas akademika adalah orang-orang yang terdidik dan paling memahami tentang makna pluralitas dan multikulturalisme. Bahkan lembaga pendidikan dapat membantu mengurangi intoleransi antar kelompok ini dengan menerapkan sistem pendidikan dan pemahaman yang mengapresiasi pluralitas dan multikulturalitas. UNESCO, satu badan penting di bawah PBB, yang menegaskan bahwa fungsi utama pendidikan bukanlah hanya terbatas pada *learning to know*, *learning to do* dan *learning to be*, tetapi juga *learning to live together*. Artinya, pendidikan seharusnya mengajarkan kepada setiap anggota masyarakat untuk menghargai kemajemukan dan membekali mereka dengan kemampuan untuk hidup bersama secara rukun sebagai sesama umat manusia (Khisbiyah:2012:90).

Universitas sebagai sebuah lembaga pendidikan maka sudah sewajarnya meminimalisir dimensi perpolitikan dalam proses pengisian jabatan, khususnya dalam hal politik identitas yakni etnisitas untuk pengisian jabatan-jabatan struktural dalam lingkup kelembagaan di universitas. Walaupun ada kecenderungan kekuatan etnis dalam pergolakan politik dalam pelaksanaan pemerintahan dan juga konflik antar etnis yang berbentuk anarkisme yang terjadi di suatu wilayah maka hal tersebut jangan sampai ikut masuk dalam lingkungan sosial dalam sebuah institusi pendidikan, karena selain akan mengganggu proses pengembangan pendidikan itu sendiri, hal tersebut juga pastinya akan justru

dan memperlemah citra universitas sebagai teladan dan cerminan masyarakat.

Walaupun pada dasarnya di Indonesia masih terjadi perdebatan sengit antar para akademisi dan juga para pengamat politik tentang adakah pengaruh antara etnisitas dalam kekuasaan. Etnisitas sebagai sebuah faktor penting yang menjadi modal sosial yang pastinya akan dimanfaatkan oleh calon-calon penguasa untuk menjaring dan mengumpulkan massa pemilihnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena hubungan etnisitas dan politik identitas dalam dinamika kekuasaan di Indonesia, yang kemudian diarahkan pada apakah kecenderungan etnisitas tersebut juga ikut masuk dalam proses pemilihan dan penunjukkan para pejabat di instansi pendidikan sekelas perguruan tinggi yang notabene dihuni oleh para akademisi yang memiliki tingkat rasionalitas dan pengetahuan politik yang jauh lebih baik dari pada masyarakat awam. Hal inilah yang menjadi landasan penelitian ini yakni untuk mengetahui sejauh mana pengaruh politik identitas dalam kekuasaan yang terjadi dalam institusi pendidikan.

I.2 Rumusan masalah

Kuatnya pengaruh etnisitas dalam kancah perpolitikan di Indonesia utamanya pasca diberlakukannya pemilihan secara langsung kepala pemerintahan baik itu dalam lingkup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai sebuah bentuk dari politik identitas memberikan sinyal-sinyal bahwa etnis menemukan sebuah arena baru untuk berkonflik yakni dalam perebutan kekuasaan

berfungsi sebagai alat pelayanan sosial.

Institusi pendidikan seperti perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi publik dalam dinamika kekuasaannya mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi politik identitas utamanya etnisitas. Hal ini karena keberadaan perguruan tinggi di daerah sebagai sebuah miniatur lingkungan sosial tempat berbaurnya berbagai macam etnis yang ada di daerah sehingga terbentuknya komunitas-komunitas berdasarkan kesamaan identitas etnis adalah sesuatu yang wajar. Sementara itu perguruan tinggi sebagai sebuah institusi pendidikan semestinya menjadi sarana utama untuk mengajarkan multikulturalisme dan pluralitas bermasyarakat guna menciptakan semangat persatuan sesuai dengan semboyan "*bhineka tunggal ika*".

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh politik identitas dalam proses pengisian jabatan di Universitas Haluoleo?
2. Bagaimanakah dinamika kekuasaan dalam proses pengisian jabatan di Universitas Haluoleo?

1.3 Batasan masalah

Dalam latar belakang telah diungkapkan bahwa fenomena mengenai politik identitas etnis di Indonesia mulai muncul dan berkembang pasca digulirkannya wacana demokrasi dalam reformasi 1998. Hal ini mendapatkan

pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menguatnya wacana etnis dalam politik juga terjadi dalam pilkada Sultra yang terjadi pada tahun 2007, masalah etnisitas yang terjadi dalam aspek sosial politik ini ditengarai oleh Riwanto Tirtosudarmo (2006) juga merembes masuk dalam dinamika kekuasaan di institusi pendidikan sekelas perguruan tinggi di Sultra. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap pengaruh politik etnis dalam dinamika kekuasaan di Unhalu pasca reformasi 1998 sampai 2013 yang diawali dengan pemilihan rektor Unhalu pada tahun 2000.

I.4 Tujuan dan kegunaan penelitian

I.4.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh politik identitas dalam proses pengisian jabatan di Universitas Haluoleo.
2. Untuk mengetahui dinamika kekuasaan dalam proses pengisian jabatan di Universitas Haluoleo.

I.4.2 Kegunaan penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, khususnya bagi pengembangan penelitian yang berbasis kualitatif mengenai kekuasaan dan

rekomendasi dan bahan perbandingan tentang pengaruh politik identitas dan dinamika kekuasaan dan pengisian jabatan utamanya dalam lingkup perguruan tinggi.

2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, Dinas Pendidikan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi dan Institusi Pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memetakan kecenderungan sikap masyarakat atas dasar etnisitas dalam dinamika kekuasaan di Sulawesi Tenggara terkhusus dalam lingkup institusi pendidikan.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dinamika kekuasaan dan politik identitas.